

PELUANG PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT DAYA PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI SORONG

Agfajrina Cindra Pamungkas¹, Etik Siswatiningrum², Nurinaya³, Muhammad Naufal Rizan Bahari⁴, Ahmad Fariz A. Muzaki Fajrin⁵, Wa Ode Irma Yanti⁶, Nur Isabella Oromna⁷, Ambarwati⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: agfajrinaunimuda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peluang paradiplomasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong Papua Barat Daya dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kabupaten Sorong salah satu wilayah memiliki potensi besar dalam investasi asing di Papua Barat Daya. Keberadaan KEK Sorong sebagai menunjukkan wilayah strategis di Papua Barat Daya dengan pertumbuhan investasi asing mengalami peningkatan, khususnya dari Tiongkok memberikan investasi asing dengan nilai mencapai Rp75 triliun untuk pembangunan smelter nikel dan pabrik baja. KEK Sorong diproyeksikan dapat menyerap 15.024 tenaga kerja dan meningkatkan PDRB Kabupaten Sorong hingga Rp10,64 triliun pada tahun 2030. Pengembangan KEK Sorong menghadapi tantangan seperti keterbatasan lahan, kebutuhan pengembangan infrastruktur, dan potensi dampak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang paradiplomasi pemerintah daerah Kabupaten Sorong melihat keberadaan proyek strategis nasional di kawasan ekonomi khusus di Sorong. Penulis menggunakan Paradiplomasi sebagai Upaya tata kelola di multilevel bertujuan untuk Pembangunan ekonomi dan perdagangan. globalisasi berperan dalam pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Keberhasilan KEK Sorong memerlukan pendekatan terintegrasi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta penguatan kapasitas paradiplomasi Pemda dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelibatan masyarakat adat.

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus; Paradiplomasi, Proyek Strategis Nasional; Pemerintah Daerah; Papua Barat Daya.

Abstract

This study examines the opportunities for paradiplomacy by the local government of Sorong Regency, Southwest Papua in the development of the Sorong Special Economic Zone as part of the National Strategic Project. Sorong Regency is one of the regions that has great potential for foreign investment in Southwest Papua. The existence of the Sorong Special Economic Zone as an indication of a strategic area in Southwest Papua with increased foreign investment growth, especially from China providing foreign investment with a value of up to Rp75 trillion for the construction of nickel smelters and steel mills. The Sorong Special Economic Zone is projected to absorb 15,024 workers and increase the GDP of Sorong Regency to Rp10.64 trillion by 2030. The development of the Sorong Special Economic Zone faces challenges such as land limitations, infrastructure development needs, and potential environmental impacts. This study aims to examine the opportunities of paradiplomacy in the local government of Sorong Regency looking at the existence of national strategic projects in the special economic zone in Sorong. The author uses Paradiplomacy as a multi-level governance effort aimed at economic development and trade. Globalization plays a role in sustainable development in West Papua. The success of the Sorong Special Economic Zone requires an integrated approach that balances economic, social, and environmental interests, as well as strengthening the capacity of local government paradiplomacy while still paying attention to sustainability aspects and the involvement of indigenous peoples.

Key words: Special Economic Zones; Paradiplomacy, National Strategic Project; Regional Government; Southwest Papua.

Article History:

Received : 2025-01-02

Revised : 2025-01-19

Accepted : 2025-02-12

PENDAHULUAN

Aktor internasional dalam hubungan Internasional tidak lagi berpusat pada negara sebagai aktor utama. Intergrasi ekonomi dalam perkembangan globalisasi menciptakan aktor non state. Fenomena globalisasi memberikan transformasi bagi pembagian kewenangan di kelembagaan pada tingkat nasional dan internasional. Beriringan dengan aktor negara sebagai agen politik, urusan internasional terus mengalami perkembangan melibatkan aktor non state untuk memanfaatkan sebuah peluang dari politik internasional (Marchetti, n.d.). Keterlibatan aktor non state mengacu pada sistem desentralisasi dan tata kelola yang bersifat Multilevel. Wilayah kota, kabupaten, distrik dan provinsi merupakan tepat lahirnya sebuah perubahan dan mesin pertumbuhan di tingkat bawah serta penerapan kebijakan, dalam artian pada tingkat lokal menjadi komponen utama dalam berbagai urusan ekonomi, politik dan sosial (Rodrigo Tavares, 2016). Wilayah regional dan kota bagian dari aktor baru dalam hubungan internasional. Pemerintah subnasional menyadari bahwa wilayah regional dan lokal berpeluang besar melakukan aktivitas secara global yang mana modal, informasi, manusia, barang dan jasa bisa saling terintegrasi dan menguat.

Proses desentralisasi terlaksana di pemerintahan dalam pengalihan kewenangan, sumber daya, tanggungjawab dan wewenang dari pemerintah nasional ke pemerintah subnasional. Pada perluasan isu non militer secara tidak langsung meluas ke tingkat nasional, regional dan lokal yang diakibatkan dari ketergantungan global. Maka dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri nasional mengacu pada lingkungan eksternal, sedangkan kebijakan luar negeri sub-nasional mengacu kondisi domestik (Rodrigo Tavares, 2016). Pemerintah nasional dan subnasional perlu membangun keseimbangan dalam lingkungan diplomatik yang semakin kompleks dan bertingkat dalam bernegosiasi berkaitan kepentingan internasional (Rodrigo Tavares, 2016). Keterlibatan aktor non-state dalam hubungan internasional dengan melibatkan entitas subnasional dikatakan paradiplomasi (Halifa Haqqi, 2024). Ruang lingkup paradiplomasi salah satunya terkait ekonomi dan perdagangan, Upaya yang dapat dilakukan oleh entitas subnasional menarik investasi asing, peningkatan perdagangan, berkerjasama dengan Perusahaan dan sektor bisnis internasional melalui jalur intifusional(Halifa Haqqi, 2024)

Praktek paradiplomasi secara umum memberikan peluang positif bagi entitas subnasional untuk membangun interaksi hubungan internasional antar kelembagaan subnasional. Provinsi Papua Barat Daya (PBD), sebagai provinsi termuda hasil pemekaran tahun 2022, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang signifikan, meliputi sektor kelautan, pertanian, pertambangan nikel, dan pariwisata, yang belum sepenuhnya tergarap optimal (Handayani & Hidayah, 2024). Wilayah ini secara geostrategis terletak di Kepala Burung Papua, berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik, menjadikannya gerbang ekonomi Indonesia Timur dan kawasan prioritas dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pemerataan pembangunan. Setian selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Papua Barat sependapat dengan ini, berdasarkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya naik melejit di angka 21,11% tertinggi secara nasional dengan didorong oleh faktor adanya lapangan kerja pertambangan dan perdagangan (James Awaeh, 2024).

KEK Sorong merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun nasional. KEK ini terletak di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dan memiliki luas 523,7 hektare. Diresmikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016, KEK Sorong diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah timur Indonesia dengan proyeksi menarik investasi sebesar Rp 32,5 triliun dan menyerap 15.024 tenaga kerja (KPPIP, 2019). Total ada 12 kawasan yang akan dibangun di dalam kompleks KEK Sorong yang meliputi; Pelabuhan Arar, Industri aspal, Industri semen curah, Pabrik LPG, Zona Pelabuhan ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan), Zona perkantoran, Zona industri besar, Zona industri menengah, tempat penimbunan dan pabrik pengolahan air, halaman kontainer, zona hutan bakau, dan ruang terbuka hijau. Lokasi ini dipilih karena berada di jalur strategis pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Pasifik dan Australia dan memiliki keunggulan geoekonomi di sektor perhubungan laut dan perikanan. (Indonesia SEZ, n.d.).

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan menggali ini peluang pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam membangun hubungan paradiplomasi.Terutama dalam

pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah untuk mendapat investasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong. Dengan memanfaatkan keunggulan geoekonomi dan geostrategis kawasan ini, pemerintah daerah dapat mendorong investasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan industri. Kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan sektor bisnis sangat penting untuk membangun kawasan terintegrasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan KEK Sorong dapat berfungsi sebagai pendorong utama bagi perekonomian Kabupaten Sorong dan sekitarnya, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

Konsep Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas sub-state atau pemerintah regional atau pemerintah daerah (Pemda), dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam buku "Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia" karya Takdir Ali Mukti (2020). Paradiplomasi menekankan bahwa meskipun kedaulatan utama berada pada negara, unsur tersebut juga dibagi dengan pemerintah daerah melalui sistem Westphalia dalam aktifitas internasionalnya. Seberapa besar tingkat pembagian kedaulatan itu berbeda-beda di tiap negara nya. Di Indonesia sendiri Pemda wajib berkonsultasi dengan pemerintah pusat sebelum melakukan kerja sama luar negeri sebagaimana yang diatur salah satunya dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 1. Pemerintah Indonesia pun melarang pembukaan kantor perwakilan di luar negeri seperti halnya negara unitary-state lainnya yang memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan negara dengan sistem federal untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga melarang intervensi asing dalam urusan dalam negeri dan memastikan kerjasama luar negeri ini memiliki pelaksanaan yang aman secara politik, yuridis, dan keamanan. (Mukti, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, karya tulis, serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sorong dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional, khususnya studi kasus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, Papua Barat Daya. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan berita media yang relevan (Uus Rusmawan, 2019). Data diolah dengan pendekatan Paradiplomasi oleh Takdir ali Mukti (2020) membahas peluang pemerintah daerah membangun kerjasama regional actor khususnya entitas subnasional melihat keberadaan Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Sorong (KEK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proyek Strategis Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong

Menurut data Kemenko Perekonomian sejak tahun 2016 Indonesia telah mengalami kesenjangan infrastruktur yang tidak merata dan penurunan investasi pasca krisis global pada 2008-2012. Pada periode krisis tersebut, Infrastructure Stock Indonesia hanya berada di angka 38% dari PDB, sedangkan rata-rata negara maju memiliki sekitar 70% (KEMENKO PEREKONOMIAN RI, 2023). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menginisiasi sebuah program pembangunan yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, PSN mengidentifikasi sejumlah proyek penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). PSN ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur tetapi juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu, seperti industri, pariwisata, perdagangan, dan energi (Kemenko Perekonomian, 2023). Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) berperan penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan. KEK diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Menurut laporan terakhir dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto (2024) "Hingga Semester I-2024, capaian kinerja KEK menunjukkan hasil yang memuaskan. KEK berhasil mencatatkan realisasi investasi secara kumulatif senilai Rp205,2 triliun dengan tenaga kerja secara kumulatif mencapai 132.227 orang". Data ini membuktikan KEK mampu memenuhi target investasi tahun 2024 dan mampu memberikan manfaat yang signifikan untuk masyarakat yang mana membuat Pemerintah Indonesia semakin optimis untuk melanjutkan proyek KEK ini (Indonesia SEZ, 2024). Hal ini pun juga menunjukkan bahwa KEK dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di daerah.

Beberapa KEK telah berkontribusi signifikan serta memberikan dampak positif pada ekonomi wilayah, melalui serapan tenaga kerja, dukungan pada UMKM, pertumbuhan infrastruktur, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan pengembangan KEK yakni peningkatan investasi, ekspor dan substitusi impor, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pembentukan model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri, pariwisata, dan jasa lainnya. Oleh karena itu, KEK menargetkan industri yang berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital. Ada 3 KEK pada tahun 2024 yang menjadi tolak ukur untuk proyek KEK lain karena keberhasilannya, diantaranya yaitu proyek tahap uji coba atau Commissioning yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di KEK Gresik, Commissioning Data Center di KEK Nongsa, dan Penerbitan izin dan simulasi perkuliahan King's College London di KEK Singhasari. Selain ketiga KEK ini ada juga KEK Mandalika yang mendapatkan apresiasi atas capaiannya sebagai KEK jasa terbaik (Indonesia SEZ, 2024).

Sejak diresmikan pada 2021 lalu, pembangunan sektor-sektor vital dari KEK Sorong mulai disebut untuk memenuhi kebutuhan industri. Sampai pada tahun 2019 sudah ada beberapa calon perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di area KEK Sorong antara lain ada PT. Semen Gresik (Semen Indonesia Group) kegiatannya membangun pabrik pengemasan semen, PT. Henrison Inti Putra untuk membangun pabrik pengolahan kayu dan sawit, dan PT. Bumi Sarana Utama (Kalla Group) membangun storage aspal curah. Lalu ada PT. Gag Nikel (untuk pembangunan smelter nikel), PT. Pelindo IV (untuk pengembangan Pelabuhan Arar sebagai sarana konektivitas dan logistik), PT. Numarin Terra Anugerah (untuk pembangunan cold storage perikanan), serta PT Power Gen (untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas/PLTMG sebesar 20 Megawatt). (Sorong, 2019).

Kendati demikian, pada tahun 2023 KEK sempat mengalami hambatan karena dinilai tidak mampu menarik investor secara optimal. Meskipun telah diberi peringatan dari pemerintah pusat karena kurangnya investasi yang masuk, tetapi pemerintah pusat tetap memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menyusun strategi baru untuk meningkatkan peluang investasi di KEK Sorong. KEK Sorong diharapkan bisa dilanjutkan karena dinilai merupakan potensi yang besar apalagi KEK Sorong merupakan KEK satu satunya di wilayah Papua. Hal ini tercermin dari pernyataan yang diberikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada salah satu acara yang bahkan menjadikan dirinya sebagai jaminan (Fadilah, 2023). Bahlil menjanjikan akan mendatangkan investor dari Tiongkok yang bergerak di bidang smelter nikel dan pabrik baterai. Bahlil juga meminta untuk agar Pemerintah Daerah Papua Barat Daya benar-benar seius dalam menangani hal ini (Rustandi, 2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun berjanji untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan KEK Sorong. Ini mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk memastikan bahwa wilayah ini tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat (Yuvensius Lasa Banafanu, 2024).

Pada tahun 2024 KEK Sorong benar-benar mendorong investor asal Tiongkok yaitu PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group dalam proyek pembangunan smelter nikel dan pabrik baja dengan total nilai investasi sebesar Rp.75 Triliun. (Nasir, 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama regional untuk membangun kawasan terintegrasi yang utamanya lewat Pemda. Tak hanya itu peran stakeholder juga sangat

berpengaruh dalam hal ini yang diantaranya Pemerintah Lokal, Perusahaan dan sektor bisnis, bahkan Pemerintah Pusat.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Sorong juga mengeluarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk mengatur aspek-aspek spesifik terkait dengan KEK, seperti tata ruang, perizinan, dan insentif. Selain itu, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku, serta memonitoring dampak pembangunan KEK terhadap masyarakat sekitar. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di Papua Barat Daya. (KPPIP, 2019). Sebagai contoh, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 (peraturan.bpk.go.id/, 2019) secara khusus mengatur tata ruang di sekitar KEK untuk memastikan pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peraturan Kementerian terkait dengan sektor-sektor yang menjadi fokus KEK, seperti industri, perdagangan, dan investasi, juga menjadi acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan di kawasan ini. (KEMENKO PEREKONOMIAN RI, 2023).

Peluang Paradiplomasi Pemda Kabupaten Sorong

Paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam hubungan internasional yang muncul pada awal abad ke-20, di mana globalisasi menghilangkan batasan antara urusan dalam dan luar negeri. Pemerintah daerah (Pemda) memainkan peran sentral dalam kerjasama lintas batas yang berdekatan dengan negara tetangga untuk memperluas perdagangan dan menarik investasi asing (SUZA, 2021). Dalam konteks ini, Pemda Kabupaten Sorong dapat menjalankan paradiplomasi strategi untuk mendukung Proyek Strategi Nasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat Daya.

Kerjasama dengan investor asing dan dalam negeri menjadi bagian penting dari strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group, dua investor asal China, berencana membangun smelter nikel dan pabrik pembuatan baja di KEK Sorong dengan nilai investasi mencapai Rp75 triliun. PT Sheng Wei akan membangun smelter nikel, sementara Beijing Jianlong akan membangun pabrik pembuatan baja. Smelter nikel di KEK Sorong akan menggunakan teknologi pengolahan nikel oksigen yang diperkaya dengan side blow furnace yang ramah lingkungan (Handayani, 2024).

Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik investor yang ingin berinvestasi di KEK Sorong. Namun, realisasi investasi terkendala dengan menyediakan bahan baku dan ketersediaan lahan. PT Sino Consultant Indonesia, sebagai perusahaan konsultan investor China, menyatakan bahwa investor membutuhkan lahan seluas 1000 hektar, tetapi lahan yang tersedia di KEK Sorong saat ini hanya 500 hektar (Antara, 2023). Konsorsium tiga perusahaan, yaitu PT Huahe Management Indonesia, PT Sino Consultant Investment Indonesia, dan PT Malamoi Olom Wonok, melakukan Memorandum Of Understanding (MOU) untuk membangun smelter nikel dan baja di KEK Sorong. Groundbreaking pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja direncanakan pada bulan Juni. Dengan adanya investasi ini, diharapkan KEK Sorong dapat menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja (Santoso, 2022).

Kehadiran investor asing merupakan langkah strategis bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat membangun paradiplomasi pada bidang ekonomi dan perdagangan. Tahapan pelaksanaan paradiplomasi pada entitas subnasional sebagai berikut: Pertama, pemerintah perlu membangun lembaga khusus untuk mengelola subnasional dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Alur kerja sama internasional yang panjang dan memakan waktu perlu lingkungan agar Pemda lebih termotivasi untuk melakukan paradiplomasi. Kedua, Pemda perlu meningkatkan kapasitas aparatur pengelola kerja sama luar negeri melalui pendidikan dan pelatihan, hal ini bertujuan agar mereka dapat merencanakan tindakan paradiplomatik dengan baik serta menetapkan tujuan dan proses yang jelas (Rachman, 2023).

Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam melaksanakan paradiplomasi, salah satunya adalah kekhawatiran bahwa paradiplomasi dapat berubah menjadi protodiplomasi, di mana daerah bertindak seolah-olah sebagai negara merdeka. Oleh

karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan kerja sama internasional, namun tetap dalam koridor kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan pemerintah pusat juga perlu berperan sebagai akselerator dan fasilitator daerah dalam menjalankan peran paradiplomatikanya (Mukti, 2022).

Dampak KEK Sorong terhadap Ekonomi Lokal

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong merupakan target prioritas untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Provinsi Papua Barat Daya. Diresmikan pada tahun 2021, pemerintah berharap KEK Sorong dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua. Dengan luas 523,7 hektar, KEK Sorong memfokuskan kegiatannya pada industri pengolahan nikel, kelapa sawit, hasil hutan, perkebunan, dan sebagai pusat logistik. Pemerintah memproyeksikan KEK Sorong akan meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sorong sekitar Rp10,64 triliun pada tahun 2030. (KPPIP, 2019).

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong membawa berbagai dampak positif bagi ekonomi lokal dan masyarakat sekitar, terutama dalam peningkatan investasi, pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM). KEK Sorong diupayakan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Diperkirakan, kawasan ini akan menyerap sekitar 15.024 tenaga kerja, memberikan peluang kerja yang luas bagi masyarakat setempat. (Setyowati, 2019). Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sorong dan Papua Barat Daya.

Dengan berbagai insentif pajak dan kemudahan regulasi, KEK Sorong mampu menarik investor dalam sektor industri pengolahan sumber daya alam, perikanan, dan logistik. Peningkatan investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas pasar tenaga kerja, serta meningkatkan permintaan barang dan jasa dari sektor pendukung lainnya. (Wahid et al., n.d.). Selain itu, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu dampak paling signifikan dari KEK Sorong. Kehadiran industri membuka banyak peluang bagi tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor informal dapat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih stabil. Untuk memastikan masyarakat lokal dapat bersaing, pemerintah dan pihak swasta turut menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) setempat. Hal ini memungkinkan tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan di sektor industri yang berkembang, mengurangi ketergantungan pada pekerja dari luar daerah. (Dr. Mohammad Mustafa Sarinanto, 2023)

Keberadaan KEK Sorong juga memberikan nilai tambah bagi komoditas atau hasil alam yang berada di wilayah Sorong dan sekitarnya, seperti kelapa sawit dan nikel, serta sagu sebagai komoditas pendukung. Sektor ekonomi lainnya yang akan terkena dampak pertumbuhan tertinggi akibat pengembangan KEK Sorong adalah sektor pengelolaan air, pengelolaan sampah, daur ulang sampah yaitu sebesar 0,26 persen, disusul dengan sektor yang akan tumbuh diikuti oleh industri pengolahan sebesar 0,24 persen dan real estate sebesar 0,25 persen. (KPPIP, 2019). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekspor karena lokasinya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Terletak di Papua Barat Daya, KEK Sorong berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Asia Pasifik seperti Tiongkok, Jepang, dan Australia.

Keberadaan Pelabuhan Sorong sebagai gerbang ekspor semakin memperkuat daya saing kawasan ini dalam distribusi barang ke pasar global. Selain itu, KEK Sorong memiliki komoditas unggulan berorientasi ekspor, seperti nikel, kelapa sawit, perikanan, serta hasil hutan dan perkebunan, yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional. Produk-produk ini dapat diolah di dalam kawasan industri sebelum diekspor, meningkatkan nilai tambah dan daya saing di tingkat global. Untuk mendukung industri ekspor, pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang membuat industri dalam KEK lebih kompetitif. Infrastruktur logistik yang terus dikembangkan, termasuk jalan utama, fasilitas penyimpanan,

dan sistem distribusi, turut mempercepat proses ekspor dan menekan biaya logistik. (Yusfita Chrisnawati, 2016) Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, KEK Sorong berpotensi menjadi pusat ekspor utama di Indonesia timur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Namun, pengembangan (KEK) Sorong juga tengah menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal realisasi investasi dan pembangunan infrastruktur. Meskipun Sorong memiliki konektivitas transportasi dan infrastruktur jalan yang penting, pelabuhannya membutuhkan peningkatan yang substansial karena adanya terumbu karang, yang menghalangi upaya perluasan kapasitas dan relokasi (Lamak, 2024). Selain itu, ketersediaan dan aksesibilitas air bersih serta sumber daya manusia yang terampil perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dengan daerah lain.

Dampak negatif dari pengembangan dan pengoperasian KEK termasuk potensi kerusakan lingkungan dan gangguan sosial. Ada kekhawatiran mengenai ancaman terhadap terumbu karang dari pembangunan infrastruktur di wilayah Selat Sele, yang dapat menyebabkan abrasi pantai dan hilangnya pulau-pulau di sekitarnya. Masyarakat nelayan dapat kehilangan pekerjaan karena berkurangnya sumber daya laut yang disebabkan oleh reklamasi lahan dan polusi, yang berdampak pada mata pencaharian tradisional seperti budidaya rumput laut. (Wati, 2024). Selain itu, masuknya kegiatan industri menimbulkan kekhawatiran akan kualitas udara dan air, peningkatan tingkat kebisingan, dan pengelolaan limbah.

Masyarakat setempat juga menyatakan kecemasan mereka tentang kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai dampak KEK, yang mengarah pada kekhawatiran tentang konsekuensi lingkungan dan sosial. Potensi konflik sosial dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dan mata pencaharian masyarakat adat Papua menjadi pertimbangan penting. (Wahid et al., n.d.). Secara keseluruhan, kehadiran KEK Sorong memberikan tantangan multidimensi, terutama pada aspek kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, dan perubahan struktur budaya masyarakat lokal. Jika tidak dikelola secara optimal, KEK dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang, mempercepat eksploitasi sumber daya alam, dan memicu disrupsi sosial akibat pergeseran nilai budaya. Diperlukan kebijakan yang berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Pemerintah perlu menerapkan program peningkatan kapasitas bagi masyarakat lokal agar dapat bersaing dalam industri yang terus berkembang. Selain itu, peraturan dampak lingkungan yang ketat harus ditegakkan untuk melindungi ekosistem. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga penting untuk memastikan keberlanjutan sosial dan budaya. Dengan strategi yang tepat, KEK Sorong dapat menjadi pusat ekonomi yang kuat tanpa mengorbankan keseimbangan ekologi dan sosial.

Keterlibatan Masyarakat Adat

Masyarakat adat di Papua, terutama di Kabupaten Sorong Selatan, memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian alam dan budaya lokal, serta berhak untuk terlibat dalam proses pembangunan daerah (Pulo, 2024). Keterlibatan ini menjadi krusial terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan seperti PT Sorong Agro Sawitindo (NAS) dan sengketa tanah adat Moi, di mana seringkali terjadi ketidakseimbangan kompensasi dengan kerusakan ekologi yang ditimbulkan.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka menjadi langkah penting. Di Distrik Konda, Sorong Selatan, masyarakat adat dari empat sub-suku telah mendapatkan pengakuan hak pengelolaan hutan seluas 40.282 hektar (COSTA, 2024). Pengakuan ini diberikan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat. Sekretaris Daerah Sorong Selatan, Dance Nauw, menekankan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam dan budaya lokal, mereka adalah penjaga hutan, sungai, dan lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan, dan pengakuan ini adalah bentuk penghormatan atas segala usaha dan kearifan lokal yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun temurun (Laila, 2024).

Namun, pengakuan saja tidak cukup. Masyarakat adat juga harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2019, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta pemerintah memberi perhatian pada pertumbuhan di Papua

Barat, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia. Ia berharap Presiden Jokowi membuka balai latihan kerja (BLK) agar anak-anak di Papua Barat mendapat manfaat dari KEK Sorong dan bisa terlibat di industri (Olivia, 2019). Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong, disingkat BPVP Sorong, didirikan berdasarkan Permenaker No 1 Tahun 2022. BPVP Sorong merupakan Unit Pelaksana Teknis Pusat di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP Sorong, 2023). Yang terbaru dari Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya telah meluncurkan program "Papua Berdaya," yang merupakan akronim dari Perencanaan akurat, pelaksanaan bermutu berbasis adat dan wilayah, program ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk turut serta secara aktif dalam perencanaan pembangunan daerah, mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua menuju Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Knasaimos, Fredrik Sagisolo, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Papua Barat Daya karena telah membuka pintu bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka (Pulo, 2024).

Dalam kasus sengketa tanah adat dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan, keterlibatan masyarakat adat menjadi semakin penting. Masyarakat adat Sub Suku Afsya dan Nakna di Distrik Konda telah membuat peta tanah dan hutan adat, peta tempat-tempat penting, yang mereka minta pemerintah akui dan lindungi hak masyarakat adat. Dialog kebijakan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan berbagai organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. DPRD Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan sidang pleno mendiskusikan rancangan perda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Sorong Selatan, namun masih diperlukan pembobotan dan masukan materi rancangan perda (Greenpeace Indonesia, 2021). Penting untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan seimbang dengan kerusakan ekologi yang ditimbulkan, dan masyarakat adat memiliki suara dalam menentukan bagaimana wilayah adat mereka dikelola dan dimanfaatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi politik paradiplomasi oleh pemerintah daerah, seperti proyek KEK di wilayah Sorong, juga memerlukan persetujuan DPRD dan penunjukan kepala daerah sebagai wakil untuk menandatangani perjanjian kerja sama luar negeri melalui surat kuasa dari pemerintah pusat. Kerja sama yang dilakukan harus mendukung pembangunan nasional maupun daerah, selaras dengan ketentuan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mensyaratkan bahwa setiap inisiatif harus terkait dengan kepentingan provinsi, setelah mendapat pertimbangan dari gubernur, serta bersifat saling menguntungkan. Semua mekanisme dan persyaratan tersebut telah dirinci dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 mengenai panduan umum luar negeri oleh pemerintah daerah. (Mukti, 2020)

Secara khusus Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten Sorong, paradiplomasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional dan internasional. Pemda Kabupaten Sorong perlu mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat menarik perhatian investor, serta menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk pengembangan KEK. Misalnya, kerjasama dengan lembaga donor internasional dapat membantu dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung KEK di Sorong (Alviona et al., 2024). Paradiplomasi juga berperan dalam memperkuat identitas lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui program-program kerjasama internasional, Pemda Kabupaten Sorong dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal agar dapat berperan aktif dalam kerjasama internasional.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait peran paradiplomasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong. Pertama, strategi paradiplomasi yang dilakukan Pemda Kabupaten Sorong telah menunjukkan hasil positif dalam menarik investasi asing, khususnya dari Tiongkok melalui PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group

dengan nilai investasi mencapai Rp75 triliun untuk pembangunan smelter nikel dan pabrik baja. Namun, implementasi paradiplomasi ini masih menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan dan koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan. Kedua, dampak KEK Sorong terhadap ekonomi lokal menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.024 orang dan proyeksi peningkatan PDRB Kabupaten Sorong sekitar Rp10,64 triliun pada tahun 2030, KEK Sorong berperan penting dalam pembangunan ekonomi regional. Meski demikian, terdapat tantangan berupa kebutuhan pengembangan infrastruktur, khususnya pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya, serta potensi dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Ketiga, keterlibatan masyarakat adat dalam pengembangan KEK Sorong menjadi aspek krusial yang memerlukan perhatian khusus. Pengakuan hak-hak masyarakat adat, seperti yang telah dilakukan di Distrik Konda melalui SK Bupati, menunjukkan langkah positif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Program "Papua Berdaya" dan pembentukan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan KEK Sorong sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemda Kabupaten Sorong perlu memperkuat kapasitas paradiplomasi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan pelibatan masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat lokal untuk memastikan manfaat KEK dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reference

Book

- Marchetti, R. (2021). *City Diplomacy: From City-States to Global Cities*.
- Mukti, T. A. (2020). *POLITIK PARADIPLOMASI DAN ISU KEDAULATAN DI INDONESIA* (S. P. Permana & A. Sahide, Eds.). The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2022). *POLITIK PARADIPLOMASI DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA* (Kalimantan Timur & Papua). YOGYAKARTA: KOMOJOYO PRESS.
- Rodrigo Tavares. (2016). *Paradiplomacy Cities and States as Global Players* (Rodrigo Tavares) (z-lib.org). Oxford University Press.
- Halifa Haqqi. (2024). *Paradiplomasi dalam Hubungan Internasional* (Yudhistiro Pandu Widhyoko, Ed.). UNISRI.
- Sugiyono, P. D. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Website

- KEMENKO PEREKONOMIAN RI. (2023, Oktober 3). *Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas*. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, September 13). *PSN Terbukti Tingkatkan Daya Saing dan Dorong Pemerataan Pembangunan Wilayah*. Retrieved from ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5378/psn-terbukti-tingkatkan-daya-saing-dan-dorong-pemerataan-pembangunan-wilayah>

- KPPIP. (2019, Oktober 11). KEK Sorong Diresmikan, Proyeksi Tarik Investasi Rp 32,5 triliun. Retrieved from kppip.go.id: <https://kppip.go.id/berita/kek-sorong-diresmikan-proyeksi-tarik-investasi-rp-325-triliun>
- kek.go.id. (n.d.). Retrieved from <https://kek.go.id/id/investment/distribution/kek-sorong>
- Nasir, J. (2024, March 18). 2 Perusahaan China Investasi Rp 75 T Bangun Pabrik Nikel-Baja di KEK Sorong. Retrieved from ` Detik Sulsel: <https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-7248237/2-perusahaan-china-investasi-rp-75-t-bangun-pabrik-nikel-baja-di-kek-sorong>
- Setyowati, H. E. (2019, October 11). Resmi Beroperasi, KEK Sorong Siap Majukan Ekonomi Papua Barat. 1-4. Sorong: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1100/resmi-beroperasi-kek-sorong-siap-majukan-ekonomi-papua-barat>
- Sorong, M. K. (2019, October 14). Beberapa Perusahaan Beroperasi di KEK Sorong. Retrieved from Info Publik: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/379724/beberapa-perusahaan-beroperasi-di-kek-sorong>
- peraturan.bpk.go.id/. (2019, November 29). Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Papua Barat. (hal. 10). Manokwari: peraturan.bpk.go.id/.
- Handayani, C. R., & Hidayah, R. A. (2024). Potensi Pertanian Provinsi Papua Barat Daya Potret Pertanian Provinsi Baru di Pulau Cendrawasih (F. I. S. Ompusunggu, Ed.). BPS Provinsi Papua Barat. <https://papuabarat.bps.go.id/id/publication/2024/09/30/ffe4f05ac563f60685e162a4/potensi-pertanian-provinsi-papua-barat-daya-potret-pertanian-provinsi-baru-di-pulau-cendrawasih.html>
- Indonesia SEZ. (n.d.). KEK Sorong. Retrieved from kek.go.id: <https://kek.go.id/id/investment/distribution/kek-sorong>
- Fadilah, I. (2023, August 6). Bahlil Pasang Badan Biar Status KEK Sorong Nggak Dicabut. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6860990/bahlil-pasang-badan-biar-status-kek-sorong-nggak-dicabut>
- James Awaeh. (2024, August 14). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Masih Sebatas Angan. RRI.co.id. <https://www.rri.co.id/sorong/keuangan/901093/kawasan-ekonomi-khusus-kek-sorong-masih-sebatas-angan>
- Rustandi, D. (2023, August 7). Bahlil Pedes Bisa Boyong Investor China Ke Papua. Rm.id. <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/182870/pertahankan-kek-sorong-bahlil-pedes-bisa-boyong-investor-china-ke-papua>
- Yuventus Lasa Banafanu, E. S. (2024, mei 18). Gubernur PBD: KEK Sorong jadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Retrieved Desember 10, 2024, from papuabarat.antaranews.com: <https://papuabarat.antaranews.com/berita/44763/gubernur-pbd-kek-sorong-jadi-lokomotif-pertumbuhan-ekonomi>
- Indonesia SEZ. (2024, July 18). Menko Airlangga: Hingga Juni 2024, KEK Berhasil Catatkan Realisasi Investasi Rp205,2 triliun dan Serap 132.227 Tenaga Kerja. Kek.Go.Id. <https://kek.go.id/id/media/press/menko-airlangga-hingga-juni-2024-kek-berhasil-catatkan-realisasi-investasi-rp205-2-triliun-dan-serap-132-227-tenaga-kerja>
- BPVP Sorong. (2023). Sejarah BPVP Sorong. Bpvpsorong.Kemnaker.Go.Id. <https://bpvpsorong.kemnaker.go.id/web/sejarah>
- COSTA, F. M. (2024, juni 6). 40.282 Hektar Hutan Masyarakat Adat Sorong Selatan Terlindungi, Bagaimana Caranya? Retrieved Februari 5, 2025, from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/06/40282-hektar-hutan-masyarakat-adat-sorong-selatan-terlindungi-bagaimana-caranya>
- Greenpeace Indonesia. (2021, november 15). Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Sorong Selatan Menekankan Perlunya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses dan Penyusunan

- Kebijakan Daerah. Retrieved febuari 5, 2025, from greenpeace.org: <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/45551/masyarakat-adat-papua-di-kabupaten-sorong-selatan-menekankan-perlunya-keterlibatan-masyarakat-dalam-proses-dan-penyusunan-kebijakan-daerah/>
- Olivia, G. (2019, October 11). Ada KEK di Sorong, Pemda Papua Barat janji tingkat kualitas SDM . Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-kek-di-sorong-pemda-papua-barat-janji-tingkat-kualitas-sdm>
- Laia, K. (2024, juni 7). Sorong Selatan Akui Wilayah Masyarakat Adat di Distrik Konda. Retrieved febuari 5, 2025, from betahita.id: <https://betahita.id/news/detail/10321/sorong-selatan-akui-wilayah-masyarakat-adat-di-distrik-konda.html?v=1717721432>
- Pulo, P. (2024, juli 25). Bapperida Papua Barat Daya libatkan masyarakat adat. Retrieved febuari 5, 2025, from papuabaratarantaranews.com: <https://papuabaratarantaranews.com/berita/48539/bapperida-papua-barat-daya-libatkan-masyarakat-adat>.
- Antara. (2023, agustus 5). Menteri Bahlil Datangkan Investor Asing ke KEK Sorong, Terkendala Bahan Baku dan Lahan. Retrieved febuari 5, 2025, from tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-bahlil-datangkan-investor-asing-ke-kek-sorong-terkendala-bahan-baku-dan-lahan-159018>
- Handayani, L. (2024, mei 30). Smelter Nikel Pertama di Sorong akan Segera Dibangun. Retrieved febuari 5, 2025, from nikel.co.id: <https://nikel.co.id/2024/05/30/smelter-nikel-pertama-di-sorong-akan-segera-dibangun/>
- Rachman, A. A. (2023, agustus 18). Paradiplomasi: bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai aktor diplomasi internasional. Retrieved febuari 5, 2025, from theconversation.com: <https://theconversation.com/paradiplomasi-bagaimana-pemerintah-daerah-berperan-sebagai-aktor-diplomasi-internasional-211123>
- Santoso, T. A. (2022, agustus 24). Pemerintah Papua Barat dukung investasi asing masuk di Kabupaten Sorong. Retrieved febuari 5, 2025, from papuabaratarantaranews.com: <https://papuabaratarantaranews.com/berita/17945/pemerintah-papua-barat-dukung-investasi-asing-masuk-di-kabupaten-sorong>.

Journal

- Pulo, P. (2024, juli 25). Bapperida Papua Barat Daya libatkan masyarakat adat. Retrieved febuari 5, 2025, from papuabaratarantaranews.com: <https://papuabaratarantaranews.com/berita/48539/bapperida-papua-barat-daya-libatkan-masyarakat-adat>.
- Antara. (2023, agustus 5). Menteri Bahlil Datangkan Investor Asing ke KEK Sorong, Terkendala Bahan Baku dan Lahan. Retrieved febuari 5, 2025, from tempo.co: <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-bahlil-datangkan-investor-asing-ke-kek-sorong-terkendala-bahan-baku-dan-lahan-159018>
- Handayani, L. (2024, mei 30). Smelter Nikel Pertama di Sorong akan Segera Dibangun. Retrieved febuari 5, 2025, from nikel.co.id: <https://nikel.co.id/2024/05/30/smelter-nikel-pertama-di-sorong-akan-segera-dibangun/>
- Rachman, A. A. (2023, agustus 18). Paradiplomasi: bagaimana pemerintah daerah berperan sebagai aktor diplomasi internasional. Retrieved febuari 5, 2025, from theconversation.com: <https://theconversation.com/paradiplomasi-bagaimana-pemerintah-daerah-berperan-sebagai-aktor-diplomasi-internasional-211123>
- Santoso, T. A. (2022, agustus 24). Pemerintah Papua Barat dukung investasi asing masuk di Kabupaten Sorong. Retrieved febuari 5, 2025, from papuabaratarantaranews.com:

<https://papuabarat.antaranews.com/berita/17945/pemerintah-papua-barat-dukung-investasi-asing-masuk-di-kabupaten-sorong>

Artikel

- Alviona, R., Priskilla, F., Setiyono, B., & Adnan, M. (2024). Cara Kerja Paradiplomasi: Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya meningkatkan investasi How the Paradiplomacy works: Kendal Regency administration attempts to increas investment. In *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN (Vol. 2, Issue 1)*. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Uus Rusmawan. 2019, Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman. Jakarta : PT Elex Media Koputindo. http://repository.upi.edu/51301/4/S_PGSD_1606399_Chapter3.pdf Diakses pada tanggal 5 Februari 2025
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Sorong. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi Di Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SORONG.
- SUZA, P. (2021). PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP ZONA PERDAGANGAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) DI BATAM. skripsi, 1-90.